

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Angusti, M. *Pengelolaan Perusahaan & Kesejahteraan Tenaga Kerja*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2019.
- Endro, M., Sigit, S. N., *Hukum Kontrak dan Perkembangannya*, Solo: Pustaka Iltizam, 2016.
- Fabozzi, F. J., Harry M, M., *The Theory and Practice of Investment Management*. New Jersey: Wiley Finance, 2011.
- Husaini, U., Purnomo, S. A., *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2017.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perjanjian*, Padang: PT Alumni, 1986.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2006.
- Prodjodikoro, W., *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin: Antasari Pers, 2011.
- Salim. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Satrio, J., *Hukum Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Semarang: Bandung Citra Aditya, 1995.
- Satrio, J. *Hukum Perikatan*, Malang: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Soerose. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Soekanto, S., *Pengantar Penelitian hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2014.
- Subekti, R. *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1995.
- Subekti, R, dan R. Tjitro Sudibyo, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- Subekti, R., *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2005.

Wahyuni et al., *Hukum Perikatan*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021.

B. Artikel jurnal

B. H. P. Rinitami Njatrijani, Hendro Saptono, "Tanggung Jawab Broker Asuransi Dalam Hal Penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi Atas Pencabutan Izin Penanggung," *Diponegoro Law Journal*, vol. 5, no. 4, (Okt, 2016): 1-13. <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.13732>.

Ishak, Vonny Debora. "Akibat Hukum Tidak Dipenuhinya Syarat Subyektif Dalam Suatu Perjanjian." *Lex et Societatis* 4, no. 7 (Juli, 2016): 1-10. <https://doi.org/10.35796/les.v4i7.12618>.

Merton, Robert C., dan Zvi Bodie. "A conceptual framework for analyzing the financial system." *The global financial system: A functional perspective* (Agustus, 1995): 3-31.

Sinaga, Niru Anita, dan Tiberius Zaluchu. "Perlindungan Hukum Hak-Hak Pekerja Dalam Hubungan Ketenagakerjaan Di Indonesia." *Jurnal Teknologi Industri*, vol. 6, (2017). <https://doi.org/10.35968/jti.v6i0.754>.

Sumarna, Dadang, dan Ayyub Kadriah. "Penelitian kualitatif terhadap hukum empiris." *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, Vol. 16, no. 02 (2023): 101-113.

C. Skripsi:

Ashila, Alya. "Pertanggungjawaban Perusahaan Pialang Asuransi Dalam Menangani Penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi Antara Pihak Tertanggung dengan Perusahaan Asuransi Ditinjau dari Hukum Perasuransian", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2018.

Widya, Savira Evani. "Pertanggungjawaban Hukum Pialang Asuransi dalam Perjanjian Asuransi", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2016.

D. Internet:

Badan Pusat Statistik, "Jumlah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Penunjang Asuransi." *Jumlah-perusahaan-asuransi-dan-perusahaan-penunjang-asuransi.htm* (diakses 31 Oktober 2024).

IBS Group, "Abouts Us", <https://www.ibsrisk.com/about-us>, (diakses 31 Oktober 2024).

Satrio, J, Sepakat dan Permasalahannya,

<https://www.hukumonline.com/berita/a/sepakat-dan-permasalahannya-lt5a4b3af6d1231/?page=all>, (diakses 1 November 2024).

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). “Kamus versi online/daring (Dalam Jaringan)”. *<https://kbbi.web.id/>*, (diakses 10 November 2024).

E. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Tahun 1974 Nomor 1).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan OJK Nomor 70/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5993).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 70/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 36/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27/OJK).

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perikatan Untuk Pendistribusian Barang Oleh Distributor atau Agen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 280).

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2023

tentang Pedoman Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal
Oleh Pialang Berjangka, Calon Pedagang Fisik Aset Kripto Dan Pedagang Fisik
Aset Kripto.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022 Perihal Pengujian Materil
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1 Agustus 2023.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 1963 tentang Gagasan
Menganggap Burgerlijk Wetboek Tidak Sebagai Undang-Undang.